



LAKIP

(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

TAHUN 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangkalan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. MAKSUD DAN TUJUAN	6
C. DASAR HUKUM.....	7
D. GAMBARAN UMUM OPD.....	8
E. TUGAS FUNGSI ORGANISASI	9
F. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	11
G. SISTIMATIKA PENULISAN	12
BAB II.....	14
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
A. PERENCANAAN KINERJA	14
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	16
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	19
BAB III	20
AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	21
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021	56
BAB IV	58
PENUTUP	58

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan Tahun 2021.

Penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bangkalan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 ini jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan, serta berguna bagi semua pihak.

Bangkalan, Maret 2022

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN' at the top and 'BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH' at the bottom. In the center, there is a signature and the text 'KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN'.

EKO SETIAWAN, S.Si, MT
NIP. 19751121 200312 1 003

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	11
Tabel 1. 2 Status Kepegawaian	12
Tabel 1. 3 Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan.....	12
Tabel 2. 1 Matrik Hubungan antara Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan dan Target.....	15
Tabel 2. 2 Matriks Hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	15
Tabel 3. 1 Kategori Penilaian	20
Tabel 3. 2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021	21
Tabel 3. 3 Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran serta capaian kinerja sasaran tahun 2021 dengan tahun 2020	38
Tabel 3. 4 Perbandingan realisasi kinerja program sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	39
Tabel 3. 5 Alokasi Anggaran per Sasaran	56
Tabel 3. 6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	57

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 memfokuskan pada capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan yang secara utuh tercakup dalam 2 Tujuan dan 3 Sasaran Strategis (SS) yang menjadi kompetensi utama BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dengan dilengkapi oleh masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara keseluruhan, capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori "**Sangat Berhasil**" yaitu sebesar 95,9% tercapai. Adapun realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 9.328.946.151** atau **95,9%** persen dari pagu anggaran sebesar **Rp. 9.728.255.045**

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai BAPPEDA Kabupaten Bangkalan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang ada, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

Menyadari hal tersebut, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *Good Governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini selaras dengan tujuan perbaikan dan inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas tersebut, dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan

capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Proses penyusunan LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi dokumen Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan dalam mencapai tujuan/sasaran strategi yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Badan selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan di masa mendatang.

2. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good*)

governance).

- b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
- 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;

D. GAMBARAN UMUM OPD

Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan tersebut, maka dijabarkan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

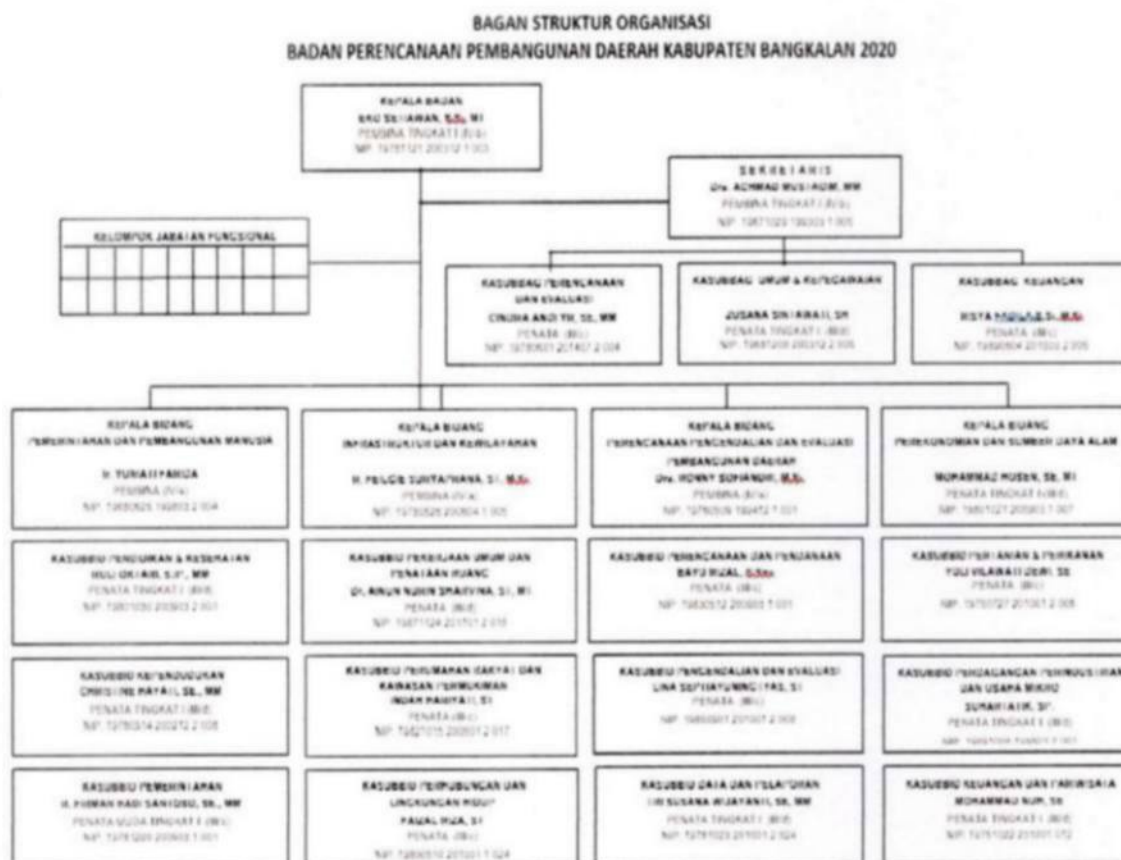
E. TUGAS FUNGSI ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan antara lain meliputi:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
 - Sub Bagian Keuangan ;

- Sub Bagian Umum.
3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pertanian dan Perikanan ;
 - Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Mikro ;
 - Sub Bidang Keuangan dan Pariwisata.
 4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan ;
 - Sub Bidang Kependudukan ;
 - Sub Bidang Pemerintahan.
 5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
 - Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ;
 - Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
 6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan ;
 - Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi ;
 - Sub Bidang Data dan Pelaporan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :



F. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Bangkalan didukung oleh Sumberdaya Manusia Aparatur sebanyak 74 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (Orang)
1	Laki-laki	33
2	Perempuan	41
Jumlah		74

Tabel 1. 2 Status Kepegawaian

NO	URAIAN	JUMLAH (Orang)
1	PNS	55
2	THL	19
Jumlah		74

Tabel 1. 3 Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1	Pasca Sarjana (S-2)	10
2	Sarjana (S-1)	36
3	Diploma	3
4	SLTA	25
5	SLTP	-
6	SD	-
Jumlah		74

* Untuk Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan Bappeda, Masih terdapat kekurangan.

G. SISTIMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan selama Tahun 2021. Capaian Kinerja (*Performance Results*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah Celah Kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 adalah sebagai berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Sebagai konsekuensi logis dari dinamika perubahan lingkungan yang begitu cepat dan tuntutan masyarakat, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan perlu mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sebagai cara pandang ke depan tentang kemana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan. Untuk itu, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bangkalan.

1. VISI

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal”

2. MISI

Dalam mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bangkalan, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan mendukung Misi ke-[p 2 yaitu :

“Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi”.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan Misi dan merupakan “*result*” (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan atau gambaran kondisi yang ingin dicapai dimasa datang.

Guna mewujudkan misi diatas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan, yaitu:

“Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Perencanaan Pembangunan Yang Efektif”

Tabel 2. 1 Matrik Hubungan antara Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan dan Target

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Perencanaan Pembangunan Yang Efektif	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam mendukung Nilai SAKIP	22,63
2	Meningkatkan kinerja urusan perencanaan	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perencanaan	82,69

4. SASARAN

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan diatas, adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif”

“Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan”

Tabel 2. 2 Matriks Hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Perencanaan Pembangunan Yang Efektif	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif	• Rata-rata Persentase ketercapaian indikator kinerja program
			• Persentase Indikator Kinerja RPJMD Dengan Capaian Hasil Minimal 80 %

2	Meningkatkan kinerja urusan perencanaan	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	• Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan
---	---	--	--

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Perencanaan Pembangunan Yang Efektif	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif	• Rata-rata Persentase ketercapaian indikator kinerja program
			• Persentase Indikator Kinerja RPJMD Dengan Capaian Hasil Minimal 80 %
2	Meningkatkan kinerja urusan perencanaan	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	• Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BAPPEDA Kabupaten Bangkalan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahun 2021. Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan tahun 2021 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perubahan anggaran sehingga ada perubahan Rencana Kerja Tahun 2021, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2021 mengalami perubahan.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, sebagai berikut:



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKO SETIAWAN, S.Si., MT**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **R. ABDUL LATIF AMIN IMRON**
Jabatan : Bupati Bangkalan
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, November 2021

Pihak Kedua

R. ABDUL LATIF AMIN IMRON

Pihak Pertama

EKO SETIAWAN, S.Si., MT

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Soekarno - Hatta No. 35 A Telp. (031) 3095482 Fax. 3096482
 BANGKALAN 69116

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Rata-Rata persentase ketercapaian indikator kinerja Program	85%
		Persentase indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%	79%
2	Terperolehnya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	87%

PROGRAM

Anggaran

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	6.449.857.842
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	1.780.390.325
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGINISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	1.498.006.877

Bangkalan, November 2021


R. ABDUL LATIF AMIN IMRON


KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BANGKALAN
EKO NUSMAN, S.Si, MT
 Kepala Tingkat I
 NIP. 19651121 200312 1 003

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil pengukuran kinerja terhadap 3 Program dan 14 kegiatan, menunjukkan bahwa secara umum BAPPEDA Kabupaten Bangkalan telah mencapai kinerja baik terkait perencanaan pembangunan daerah. Meski demikian masih terdapat beberapa indikator yang masih memiliki target sangat rendah. Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka penetapan indikator - indikator kinerja serta rencana pencapaiannya dilakukan sejak awal perencanaan program dan kegiatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dari setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai oleh indikator kinerja tersebut, sehingga diketahui selisih kinerjanya (performance gap). Berdasarkan performance gap tersebut, dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam proses pengukuran kinerja tersebut, diperhatikan prinsip - prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan, maka telah kami tetapkan standart pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Kategori Penilaian

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	86% sampai dengan 100 %	Sangat Berhasil
2.	71 % s/d kurang dari 86 %	Berhasil
3.	56 % s/d kurang dari 70 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Tujuan dan Sasaran

Tujuan:

- Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Perencanaan Pembangunan yang Efektif
- Meningkatkan kinerja urusan perencanaan

Sasaran:

- Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif.
- Terpenuhi Pelayan Kesekretariatan

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Tabel 3. 2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

No	No Itek	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan	Indikator Baru	Tahun 2021					
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
		Meningkatkan kinerja urusan perencanaan	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perencanaan	82,69	%	82	%	99,58%	95,68%
		Terpenuhi Pelayan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	87	%	78,60	%	90,34%	95,68%

Tahun 2021											
No	No Rek	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan	Indikator Baru	Target		Realisasi		Capaian Kinerja			
				Kinerja		Anggaran		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
A	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	96	%	95,37%	6.449.857.843	%	6.171.530.118	99,34%	95,68%
I	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	100%	30.885.450	%	28.944.350	100,00 %	93,72%
1	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3	Dok	3	17.379.300	Dok	17.379.300	100,00 %	100,00%
2	5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	Dok	1	1.137.700	Dok	1.137.700	100,00 %	100,00%
3	5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	Dok	1	1.137.700	Dok	1.137.700	100,00 %	100,00%
4	5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	Dok	1	1.137.700	Dok	371.700	100,00 %	32,67%

No	No Rek	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan	Indikator Baru	Tahun 2021					
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
5	5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dok	1.512.700	1 Dok	1.411.700	100,00 %	93,98%
6	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dok	5.601.700	1 Dok	5.601.700	100,00 %	100,00%
7	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 Lap	2.978.650	8 Lap	1.894.550	100,00 %	63,60%
II	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	4.409.243.126	104,8 %	4.393.764.854	104,80 %	99,65%
8	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	55 Orang	4.376.478.176	55 Orang	4.363.480.954	100,00 %	99,70%
9	5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Lap	1.696.000	310 Lap	660.750	124,00 %	38,96%

No	No Rek	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan	Indikator Baru	Tahun 2021						Capaian Kinerja	
				Target		Realisasi		Anggaran	Kinerja	Kinerja	Anggaran
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran				
10	5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	12	Lap 1.272.200	12	Lap 597.200			100,00 %	46,94%
11	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1	Dok 27.390.100	1	Dok 27.390.100			100,00 %	100,00%
12	5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	18	Lap 2.406.650	18	Lap 1.635.850			100,00 %	67,97%
III	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100	% 3.095.800	100%	% 2.593.800			100,00 %	83,78%
13	5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	7	Lap 1.398.600	7	Lap 1.137.600			100,00 %	81,34%
14	5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Lap 1.697.200	7	Lap 1.456.200			100,00 %	85,80%

No	No Rek	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan	Indikator Baru	Tahun 2021								Capaian Kinerja	
				Target		Realisasi		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran						
IV	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah yang terlaksana	100	%	94.469.450	100%	%	94.357.250	100,00 %	99,88%		
15	5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1	Unit	9.166.400	1	Unit	9.054.200	100,00 %	98,78%		
16	5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakailan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakailan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90	Buah	85.303.050	90	Buah	85.303.050	100,00 %	100,00%		
17	5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	28	Orang	-	0	Orang	-	0,00%			
18	5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	28	Orang	-	0	Orang	-	0,00%			
V	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	%	351.058.700	77,76%	%	218.045.603	97,20%	62,11%		

No	No Rek	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan	Indikator Baru	Tahun 2021						Capaian Kinerja	
				Target		Realisasi		Anggaran	Kinerja	Kinerja	Anggaran
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran				
19	5.01.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	140	Unit 14.302.350	128	Unit 11.628.500		128	91,43%	81,30%
20	5.01.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.225	Unit 114.319.300	1107	Unit 78.411.150		1107	90,37%	68,59%
21	5.01.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Unit 18.399.100	1	Unit 12.189.100		1	100,00 %	66,25%
22	5.01.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7	Jenis 31.946.950	7	Jenis 15.074.400		7	100,00 %	47,19%
23	5.01.01.2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5	Jenis 8.100.000	5	Jenis 6.660.000		5	100,00 %	82,22%
24	5.01.01.2.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Kali 7.753.000	5	Kali 3.570.000		5	20,83%	46,05%

No	No Rek	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan	Indikator Baru	Tahun 2021								Capaian Kinerja	
				Target		Realisasi						Kinerja	Anggaran
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
25	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Kali	156.238.000	50	Kali	90.512.453	41,67%	57,93%		
26	5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersusun	30	Lap	-	0	Lap	-	0,00%	-		
VI	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	%	208.348.900	86,49%	%	203.094.250	86,49%	97,48%		
27	5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	37	Unit	208.348.900	32	Unit	203.094.250	86,49%	97,48%		
VII	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.124.308.305	100%	%	1.023.110.462	100,00 %	91,00%		
28	5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Jenis	13.741.005	4	Jenis	9.610.100	100,00 %	69,94%		

No	No Rek	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan	Indikator Baru	Tahun 2021						Capaian Kinerja	
				Target		Realisasi		Anggaran	Kinerja	Kinerja	Anggaran
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran				
29	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Jenis 141.550.600	3	Jenis 84.506.862			100,00 %	59,70%
30	5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jenis 133.169.600	1	Jenis 132.774.400			100,00 %	99,70%
31	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7	Jenis 835.847.100	7	Jenis 796.219.100			100,00 %	95,26%
VII I	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	% 228.448.112	93,90%	% 207.619.549			93,90%	90,88%
32	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	20	Unit 85.544.913	20	Unit 70.656.332			100,00 %	82,60%
33	5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	8	Unit 33.013.905	8	Unit 31.582.097			100,00 %	95,66%

No	No Rek	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan	Indikator Baru	Tahun 2021						Capaian Kinerja	
				Target		Realisasi		Anggaran	Kinerja	Kinerja	Anggaran
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran				
34	5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang dipelihara	17	Unit	0	Unit			0,00%	
35	5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	78.143.644	1	100,00 %	77.255.470
36	5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	123	Unit	93	Unit	31.745.650	93	75,61%	28.125.650
		Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Perencanaan Pembangunan Yang Efektif	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam mendukung Nilai SAKIP	22,63	%	21,4	%	3.278.397.202	21,4	94,56%	3.157.416.033
		Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif	Persentase Indikator Kinerja RP/MD Dengan Capaian Hasil Minimal 80 %	79	%	76,19	%	1.780.390.325	76,19	96,44%	1.738.071.683
8	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata persentase keselarasan antar dokumen perencanaan dan perencanaan dengan pelaksanaan	79	%	86,67	%	1.780.390.325	86,67	109,71 %	1.738.071.683

No	No Rek	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan	Indikator Baru	Tahun 2021								
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja				
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
IX	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	100	%	100	%	100,00 %	1.057.807.325	100	1.048.659.483	99,14%
37	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Laporan Pelaksanaan CSR/TSLP	1	Lap	1	Lap	100,00 %	4.950.200	1	4.020.200	81,21%
38	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Hasil Forum SKPD/Lintas SKPD	1	Lap	1	Lap	100,00 %	38.606.150	1	38.606.150	100,00%
39	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara Hasil Forum SKPD/Lintas SKPD	1	Lap	1	Lap	100,00 %	98.403.850	1	98.403.850	100,00%
40	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/kota	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD/RPJMD	1	Lap	1	Lap	100,00 %	99.515.850	1	99.515.850	100,00%
41	5.01.02.2.01.06	Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Laporan Hasil Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1	Lap	1	Lap	100,00 %	35.993.000	1	35.993.000	100,00%

No	No Rek	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan	Indikator Baru	Tahun 2021						Capaian Kinerja	
				Target		Realisasi		Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran				
42	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Lap	1	Lap	780.338.275	1	772.120.433	100,00 %
				1	Dok	1	Dok				100,00 %
				1	Dok	1	Dok				100,00 %
				1	Dok	1	Dok				100,00 %
X	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	RKP Kab. Bangkalan	55	%	56,17	%	685.961.600	56,17	653.390.400	102,13 %
				1	Dok	1	Dok	558.780.900	1	528.947.900	100,00 %
43	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan	Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Dok	1	Dok	528.947.900	1	528.947.900	94,66%

No	No Rek	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan	Indikator Baru	Tahun 2021						Capaian Kinerja	
				Target		Realisasi		Anggaran	Kinerja	Kinerja	Anggaran
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran				
				1	Lap	1	Lap			100,00 %	
44	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Laporan Tim Percepatan Pembangunan Daerah	1	Lap	1	Lap	117.440.700	1	100,00 %	114.702.500
45	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah	Dokumen Profil Pembangunan Daerah	1	Dok	1	Dok	9.740.000	1	100,00 %	
XI	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terlaksana	80	%	81,25	%	36.621.400		101,56 %	36.021.800
46	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	Lap		Lap	-			
47	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	14	Lap	14	Lap	36.621.400		100,00 %	36.021.800

Tahun 2021											
No	No Rek	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan	Indikator Baru	Target		Realisasi		Capaian Kinerja			
				Kinerja		Anggaran		Kinerja		Anggaran	
										Kinerja	Anggaran
		Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif	Rata-rata persentase ketercapaian indikator kinerja program	85	%	79,37	%	1.419.344.350	93,38%	94,75%	
C	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah dengan perencanaan kinerja berkualitas baik	73,08	%	65,38	%	1.419.344.350	88,94%	94,75%	
XII	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik	58,82	%	50	%	469.963.500	85,01%	95,85%	
48	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang tersusun	3	Lap	3	Lap	8.595.300	100,00 %	62,16%	
49	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang tersusun	1	Dok	1	Dok	117.529.100	100,00 %	99,52%	
50	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Yang tersusun	1	Dok Lap	0	Dok Lap		0,00%		

No	No Rek	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan	Indikator Baru	Tahun 2021							
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja			
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
51	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan hasil koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang tersusun	1 Dok Lap	18.324.100	1 Dok Lap	14.891.950	100,00 %	81,27%		
52	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bldng Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang tersusun	6 Lap	19.739.250	6 Lap	18.703.200	100,00 %	94,75%		
53	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang tersusun	2 Dok	231.408.550	2 Dok	228.757.300	100,00 %	98,85%		
54	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang tersusun	1 Dok Lap	-	0 Dok Lap	-	0,00%			
55	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang tersusun	2 Dok Lap	88.896.267	2 Dok Lap	81.486.650	100,00 %	91,66%		
XII I	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (KOSDA) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik	100 %	387.804.110	91 %	354.665.200	91,00%	91,45%		

No	No Rek	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan	Indikator Baru	Tahun 2021						Capaian Kinerja	
				Target		Realisasi		Anggaran	Kinerja	Kinerja	Anggaran
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran				
56	5.01.03.2.02.0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang tersusun	3	Lap 7.934.950	3	Lap 7.934.950			100,00 %	100,00%
57	5.01.03.2.02.0 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan yang tersusun	2	Dok 209.520.799	2	Dok 189.426.000			100,00 %	90,41%
58	5.01.03.2.02.0 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan yang tersusun	-	Lap	-	Lap			-	
59	5.01.03.2.02.0 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Dokumen Laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang tersusun	2	Dok Lap 36.616.910	2	Dok Lap 33.084.550			100,00 %	90,35%
60	5.01.03.2.02.0 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	3	Lap 6.417.850	3	Lap 6.417.850			100,00 %	100,00%
61	5.01.03.2.02.0 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	1	Dok 112.871.048	1	Dok 108.641.100			100,00 %	96,25%

Tahun 2021											
No	No Rek	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan	Indikator Baru	Target		Realisasi		Capaian Kinerja			
				Kinerja		Anggaran		Kinerja		Anggaran	
62	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	-	Lap	-	-	-	-	-	-
63	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	1	Dok Lap	14.442.553	1	Dok Lap	9.160.750	100,00 %	63,43%
XI V	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (INFRA SWIL) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik	100	%	619.907.200	100	%	594.715.650	100,00 %	95,94%
64	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun	1	Lap	25.776.200	1	Lap	22.876.200	100,00 %	88,75%
65	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun	2	Dok	315.119.500	2	Dok	305.007.950	100,00 %	96,79%
66	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun	1	Lap	1.863.500	1	Lap	1.863.500	100,00 %	100,00%

No	No Rek	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan	Indikator Baru	Tahun 2021					
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
57	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun	1	Dok Lap 26.784.000	1	Dok Lap 26.694.000	100,00 %	99,66%
58	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Kewilayahan yang tersusun	1	Lap 7.484.000	1	Lap 6.044.000	100,00 %	80,76%
59	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang tersusun	1	Dok 211.240.000	1	Dok 205.540.000	100,00 %	97,30%
70	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang tersusun	1	Lap 1.740.000	1	Lap 1.740.000	100,00 %	100,00%
71	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang tersusun	1	Dok Lap 29.900.000	1	Dok Lap 24.950.000	100,00 %	83,44%
TOTAL				9.728.255.045		9.328.946.151		95,90%	

2. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3. 3 Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran serta capaian kinerja sasaran tahun 2021 dengan tahun 2020

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	
			Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif.	Rata-rata Persentase ketercapaian indikator kinerja program	65,38%	85,00%	79,37%
		Persentase Indikator Kinerja RPJMD Dengan Capaian Hasil Minimal 80 %	67,50%	79,00%	76,19%
Meningkatkan kinerja urusan perencanaan	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	78,17%	87,00%	78,60%



Dari tabel diatas dapat disimpulkan pada sasaran " **Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang efektif** " diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

1. Target pada indikator kinerja Rata-rata Persentase ketercapaian

indikator kinerja program untuk tahun 2021 adalah sebesar 85 persen dengan realisasi sebesar 79,37 persen mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2020 yang sebesar 65,38 persen

2. Target pada indikator kinerja “Peresentase Indikator Kinerja RPJMD dengan Capaian Hasil Minimal 80%” untuk tahun 2021 sebesar 79 persen dengan realisasi sebesar 76,19 persen mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2020 yang sebesar 67,50 persen

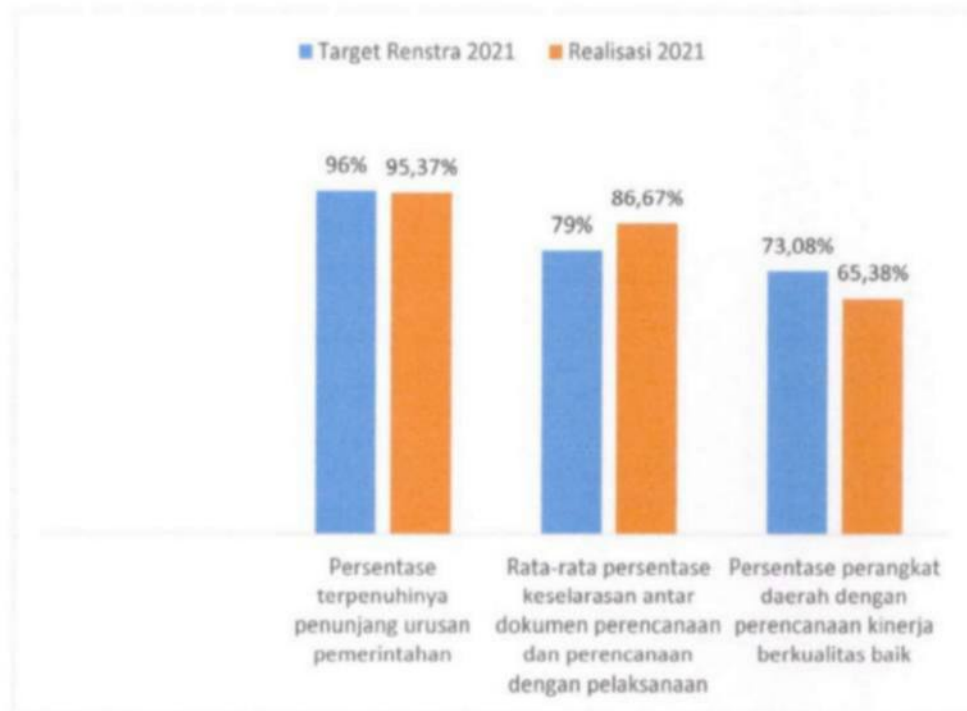
Sasaran “ **Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan** ” diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

1. Target pada indikator kinerja “ Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan ” untuk tahun 2021 adalah sebesar 87,00 persen dengan realisasi sebesar 78,60 persen dan mengalami kenaikan dari realisasi Tahun 2020 yang sebesar 78,17%.

3. **Perbandingan realisasi kinerja program sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis**

Tabel 3. 4 Perbandingan realisasi kinerja program sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra 2021	Realisasi 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	96%	95,37%
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata persentase keselarasan antar dokumen perencanaan dan perencanaan dengan pelaksanaan	79%	86,67%
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah dengan perencanaan kinerja berkualitas baik	73,08%	65,38%



Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1) Program Pelayanan Kesekretariatan Kegiatannya Meliputi

- 1) Kegiatan **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Tersusunnya Dokumen Renja Tahun 2022
- Tersusunnya Dokumen Perubahan Renja Tahun 2021
- Tersusunnya Dokumen Perubahan Renstra

b) Sub Kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya Dokumen RKA Tahun 2021 dengan tepat waktu

c) Sub Kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA Tahun 2021 tepat waktu

d) Sub Kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya Dokumen DPA sesuai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berlaku.

e) Sub Kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya Perubahan DPA sesuai dengan perubahan Anggaran serta klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berlaku

f) Sub Kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya Dokumen LAKIP Tahun 2021

g) Sub Kegiatan **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Tersusunnya laporan triwulan rencana kerja dan rencana aksi.

2) Kegiatan **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan tepat waktu

b) Sub Kegiatan **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Terverifikasinya SPJ GU/TU/LS

c) Sub Kegiatan **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya pelaporan pelaksanaan anggaran dan belanja daerah.

d) Sub Kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan akhir Tahun

e) Sub Kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD (bulanan/ triwulan/ semesteran).

3) Kegiatan **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan **Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Tersusunnya Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

b) Sub Kegiatan **Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Barang Habis Pakai tepat waktu

4) Kegiatan **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan **Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya Peningkatan disiplin aparatur.

b) Sub Kegiatan **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Terpenuhinya pakaian dinas

c) Sub Kegiatan **Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**
Tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing

d) Sub Kegiatan **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing

5) Kegiatan **Administrasi Umum Perangkat Daerah** yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Tersedianya sarana pendukung yang memadai.
- Memberikan kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja.

b) Sub Kegiatan **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Tersedianya sarana pendukung yang memadai.
- Memberikan kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja.

c) Sub Kegiatan **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Tersedianya bahan logistik kantor

d) Sub Kegiatan **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Tersedianya sarana dan prasarana kantor

e) Sub Kegiatan **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Tersedianya bahan bacaan yang dapat memberikan berbagai informasi berita-berita terkini yang sedang terjadi.

f) Sub Kegiatan **Fasilitasi Kunjungan Tamu**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Tersedianya jamuan tamu

g) Sub Kegiatan **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dan meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Bappeda

h) Sub Kegiatan **Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**

Tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing

6) Kegiatan **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah** yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang keberhasilan pekerjaan pegawai

7) Kegiatan **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

b) Sub Kegiatan **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
- Memberikan kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja

c) Sub Kegiatan **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

d) Sub Kegiatan **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Terpenuhinya pembayaran jasa pelayanan umum kantor

8) Kegiatan **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabat**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Terpenuhinya pembayaran pajak dengan tepat waktu.
- Terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya.

- b) Sub Kegiatan **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Terpenuhinya pembayaran pajak dengan tepat waktu
- Terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya

- c) Sub Kegiatan **Pemeliharaan Mebel**

Tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing

- d) Sub Kegiatan **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung tepat waktu atau sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas

- e) Sub Kegiatan **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Pemeliharaan sarana dan prasarana cepat teratasi.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dalam kelancaran melaksanakan tugas.

- Memberikan kenyamanan dalam beraktivitas.

2) Program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah meliputi ;

1) Kegiatan **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan **Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya**
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Tersusunnya Laporan pelaksanaan CSR/ TSLP

b) Sub Kegiatan **Pelaksanaan Konsultasi Publik**
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Berita acara forum konsultasi publik

c) Sub Kegiatan **Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD**
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Berita acara hasil forum SKPD/Lintas SKPD

d) Sub Kegiatan **Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota**
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Berita acara hasil musrenbang RKPD/ RPJMD

e) Sub Kegiatan **Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan**
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Laporan hasil koordinasi musrenbang kecamatan.

f) Sub Kegiatan **Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Laporan hasil koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah
- Perda Perubahan RPJMD 2018-2023
- P-RKPD Kab. Bangkalan
- RKPD Kab. Bangkalan

2) Kegiatan **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan **Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- Laporan tim percepatan pembangunan daerah.

b) Sub Kegiatan **Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Laporan Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

c) Sub Kegiatan **Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Dokumen profil pembangunan daerah.

3) Kegiatan **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut :

- d) Sub Kegiatan **Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota**

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing

- e) Sub Kegiatan **Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Kegiatan **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Tersusunnya laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan.

- b) Sub Kegiatan **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan.

c) Sub Kegiatan **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan.

d) Sub Kegiatan **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya dokumen laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan.

e) Sub Kegiatan **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia.

f) Sub Kegiatan **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia.

g) Sub Kegiatan **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya hasil monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia.

h) Sub Kegiatan **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya dokumen laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia.

2) Kegiatan **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Tersusunnya laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian.

b) Sub Kegiatan **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian.

c) Sub Kegiatan **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian

d) Sub Kegiatan **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya dokumen laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian.

e) Sub Kegiatan **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Sumber Daya Alam).

f) Sub Kegiatan **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA**

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA (Sumber Daya Alam).

g) Sub Kegiatan **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA (Sumber Daya Alam)

h) Sub Kegiatan **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA (Sumber Daya Alam).

3) Kegiatan **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Tersusunnya laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur

b) Sub Kegiatan **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah infrastruktur

c) Sub Kegiatan **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur

d) Sub Kegiatan **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya Dokumen Laporan hasil Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan armonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur

e) Sub Kegiatan **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daeraha bidang kewilayahan

f) Sub Kegiatan **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan

g) Sub Kegiatan **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang kewilayahan

h) Sub Kegiatan **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan**

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya Dokumen Laporan hasil Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan

Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja

Secara umum hasil capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa indikator yang masih belum mencapai target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di BAPPEDA Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian target rencana kinerja yang ditetapkan tidak terlepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di BAPPEDA Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 adalah:

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, sehingga target kinerja telah terealisasi.
- b. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- c. Adanya sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas.
- d. Adanya kerjasama yang baik antar bagian dalam organisasi.
- e. Sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan rencana.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di BAPPEDA Kabupaten Bangkalan diantaranya PPKM karena pandemi covid-19 yang mengakibatkan koordinasi tidak terlaksana maksimal dan refocusing anggaran yang menyebabkan sebagian sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang ditetapkan, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2021.

Tabel 3. 5 Alokasi Anggaran per Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif.	Rata-rata Persentase ketercapaian indikator kinerja program	1.498.006.877	1.419.344.350	95%
	Persentase Indikator Kinerja RPJMD Dengan Capaian Hasil Minimal 80 %	1.780.390.325	1.738.071.683	98%

Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	6.449.857.843	6.171.530.118	96%
--	--	---------------	---------------	-----

Dari pagu belanja Tahun Anggaran 2021, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 9.328.946.151 atau 95,9 persen.

Tabel 3. 6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	ANGGARAN
		Capaian	Capaian
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif.	Rata-rata Persentase ketercapaian indikator kinerja program	93,38%	95%
	Persentase Indikator Kinerja RPJMD Dengan Capaian Hasil Minimal 80 %	96,44%	97,62%
Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	90,34%	95,68%

Tingkat efisiensi dihitung melalui rumus (Nasoetion, 2011):

$$E = \frac{O}{I};$$

E = Efisiensi

O = Output

I = Input

Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu. Jika output yang dihasilkan lebih besar dari pada sumber daya yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai. Output dalam hal ini adalah prosentase capaian kinerja, sedangkan inputnya adalah prosentase penyerapan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang perencanaan pembangunan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Bangkalan. Di masa mendatang BAPPEDA Kabupaten Bangkalan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Bangkalan. BAPPEDA Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu penyangga utama birokrasi telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud birokrasi yang efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada kebutuhan rakyat. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan reformasi birokrasi ini melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang BAPPEDA Kabupaten Bangkalan akan melakukan berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

BANGKALAN, Maret 2022

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN BANGKALAN



EKO SETIAWAN, S.Si., MT

NIP. 19751121 200312 1 003

LAMPIRAN

Rata-rata persentase ketercapaian indikator kinerja program PD

No	OPD	Program	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pwangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik	73,08	%	63	%	88,94	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpublisnya penunjang urusan pemerintahan (Dapreda)	96	%	95,37	%	99,34	%
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Persentase Keterlaksanaan Antar Dokumen Perencanaan dan Perencanaan dengan Pelaksanaan	79	%	86,67	%	109,71	%
2	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpublisnya penunjang urusan pemerintahan (SeK DPRD)	100	%	94,04	%	94,04	%
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raport yang ditetapkan dan Hasil Keputusan Rapat Yang ditandatangani DPRD	100	%	97,42	%	97,42	%
3	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang telah memiliki HKI dan/atau telah didaftarkan	1	produk	0	produk	0,00	%
			Persentase Rekomendasi Hasil Riset Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di tindak lanjuti	100	%	100	%	100,00	%
			Persentase Rekomendasi Hasil Riset Bidang Sosial dan Pemerintahan yang di tindak lanjuti	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpublisnya penunjang urusan pemerintahan (Dalsbangda)	100	%	99,24	%	99,24	%
4	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpublisnya penunjang urusan pemerintahan (Inspektorat)	66,25	%	67,3	%	101,58	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi yang dilaksanakan atas hasil pengawasan internal	100	%	97	%	97,00	%
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP minimal D	61,54	%	61,54	%	100,00	%
5	KECAMATAN AROSBAYA	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Arosbaya)	90	%	77	%	85,56	%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Arosbaya)	80	%	80	%	100,00	%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Arosbaya)	90	%	90	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpublisnya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Arosbaya)	90	%	90	%	100,00	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Arosbaya)	85	%	80	%	94,12	%
6	KECAMATAN BANGKALAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Bangkalan)	80	%	79,1	%	98,88	%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi	80	%	68,50	%	85,63	%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Bangkalan)	80	%	80	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpublisnya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Bangkalan)	80	%	78,99	%	98,74	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Bangkalan)	85	%	80	%	94,12	%
7	KECAMATAN BILGA	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Bilga)	82	%	82	%	100,00	%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Bilga)	82	%	50	%	60,98	%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Bilga)	82	%	75	%	91,46	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpublisnya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Bilga)	82	%	82	%	100,00	%

No	OPD	Program	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Blaga)	82	%	82	%	100,00	%
8	KECAMATAN BURNIH	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Burnih)	90	%	92,76	%	103,07	%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Burnih)	90	%	99,97	%	111,08	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Burnih)	90	%	99,33	%	110,37	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Burnih)	0	%	0	%	0	%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Burnih)	0	%	0	%	0	%
9	KECAMATAN OGER	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Oger)	90	%	100	%	111,11	%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Oger)	90	%	100	%	111,11	%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Oger)	0	%	0	%	0,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Oger)	90	%	99,84	%	110,93	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Oger)	0	%	0	%	0,00	%
10	KECAMATAN KLAMPIS	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Klampis)	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Klampis)	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Klampis)	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Klampis)	100	%	98,98	%	98,98	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Klampis)	0	%	0	%	0	%
11	KECAMATAN MODUNG	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Modung)	0	%	0	%	0,00	%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Modung)	90	%	98	%	108,89	%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Modung)	0	%	0	%	0,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Modung)	90	%	99,8	%	110,89	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Modung)	0	%	0	%	0,00	%
12	KECAMATAN SEPULU	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Sepulu)	90	%	90	%	100,00	%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Sepulu)	0	%	0	%	0,00	%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Sepulu)	90	%	90	%	100,00	%

No	OPD	Program	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Sepdu)	100	%	99,48	%	99,48	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Sepdu)	100	%	100	%	100,00	%
13	KECAMATAN KAMAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Terlaksana (Kec. Kamal)	60	%	27	%	45,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Kamal)	100	%	71	%	71,00	%
	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi sesuai standar pelayanan (Kec. Kamal)	70	%	20	%	28,57	%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAJAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Kamal)	80	%	0	%	0,00	%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Kamal)	0	%	0	%	0	%
14	KECAMATAN GALIS	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Galis)	90	%	90	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Galis)	100	%	98,65	%	98,65	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Galis)	0	%	0	%	0,00	%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Galis)	0	%	0	%	0,00	%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAJAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Galis)	0	%	0	%	0,00	%
15	KECAMATAN KOKOP	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Kokop)	90	%	100	%	111,11	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Kokop)	90	%	99,51	%	110,57	%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAJAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Kokop)	0	%	0	%	0	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Kokop)	0	%	0	%	0	%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Kokop)	0	%	0	%	0	%
16	KECAMATAN KONANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Konang)	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAJAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Konang)	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Konang)	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Konang)	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Konang)	0	%	0	%	0	%
17	KECAMATAN KWANYAR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Kwanyar)	90	%	98	%	108,89	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Kwanyar)	90	%	99,19	%	110,21	%

No	OPD	Program	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Kewajene)	0	%	0	%	0	%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Kewajene)	0	%	0	%	0	%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Kewajene)	0	%	0	%	0	%
18	KECAMATAN LABANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Labang)	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Labang)	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Labang)	100	%	99,95	%	99,95	%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Labang)	0	%	0	%	0	%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Labang)	0	%	0	%	0	%
19	KECAMATAN SOCAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Soch)	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Soch)	100	%	98,98	%	98,98	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Soch)	100	%	99,95	%	99,95	%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Soch)	0	%	0	%	0	%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Soch)	0	%	0	%	0	%
20	KECAMATAN TANAH MERAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Tanah Merah)	90	%	82	%	91,11	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Tanah Merah)	100	%	97,93	%	97,93	%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Tanah Merah)	0	%	0	%	0	%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Tanah Merah)	0	%	0	%	0	%
21	KECAMATAN TANJUNG BUMI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Tanjung Bumi)	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Tanjung Bumi)	90	%	99,8	%	110,89	%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Soch)	0	%	0	%	0	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Soch)	0	%	0	%	0	%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Soch)	0	%	0	%	0	%
22	KECAMATAN TRAGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Tragah)	70	%	45	%	64,29	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Tragah)	90	%	98,28	%	109,20	%

No	OPD	Program	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Tugu)	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Soah)	0	%	0	%	0	%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Soah)	0	%	0	%	0	%
23	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	PROGRAM PENDATANGAN SIPIL	Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki Akta	29	%	29	%	100,00	%
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pendataan penduduk	85	%	85	%	100,00	%
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengumpulan, Pengelompokan, Penyajian dan Pemertan Data Kependudukan	95	%	95	%	100,00	%
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengolahan profil kependudukan yang dilaksanakan	280		280		100,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dipendokopsil)	100	%	100	%	100,00	%
24	BADAN KEPENGAWAHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	PROGRAM KEPENGAWAHAN DAERAH	Persentase Aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	80	%	80	%	100,00	%
			Persentase ASN yang memenuhi kriteria penilaian, pengembangan, dan hukuman disiplin	85	%	85	%	100,00	%
			Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi data dan informasi kepegawaian	80	%	80	%	100,00	%
			Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi fungsional, akademik, dan pengembangan kompetensi lainnya serta penilaian / evaluasi kompetensi	3	%	3	%	100,00	%
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti latar sertifikasi kelengkapan serta pengembangan kompetensi manajerial dan kompetensi teknis	5	%	5	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (DIPKPSDA)	82	%	82	%	100,00	%
25	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase terlaksananya Pembinaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100	%	72	%	72,00	%
		PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pembinaan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	%	77	%	77,00	%
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	100	%	88	%	88,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100	%	98	%	98,00	%
		PROGRAM BINAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Terpenuhinya Binaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100	%	95	%	95,00	%
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar minimal perpustakaan	84	%	84	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	81	%	81	%	100,00	%
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pengolahan kearsipan	70	%	50	%	71,43	%
27	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase capaian standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan	95	%	95	%	100,00	%
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM pendidikan	45	%	45	%	100,00	%
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Capaian Penilaian Satuan Pendidikan sesuai ketentuan	100	%	100	%	100,00	%

No	OPD	Program	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Pendidikan)	90	%	90	%	100,00	%
28	DINAS KB, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KES)	Persentase peningkatan Keluarga Sejahtera	86	%	86	%	100,00	%
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase capaian peserta KB aktif	584		566		96,92	%
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Capaian Tingkat KLA	510	skor	225	skor	44,12	%
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Tingkat Capaian PUG	80	%	77	%	96,25	%
		PROGRAM PENOBHATAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	562		562	%	100,00	%
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah kelompok Usaha Pemukiman Padatan yang dibina	29	%	26	%	89,66	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas KB P3A)	169		86		50,89	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase perlindungan anak yang terlayani	50	%	50	%	100,00	%
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perlindungan perempuan yang terlayani	10	%	5	%	50,00	%
29	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGI KOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda dan jumlah atlet muda yang berprestasi	50	orang	0	%	0,00	%
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGI KEMUDAAN	Jumlah Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	810	orang	108	orang	13,33	%
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah pemuda yang berperan aktif dalam organisasi kepramukaan	14012	orang	14012	orang	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga	100	%	86	%	86,00	%
30	DINAS SOSIAL	PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	14	%	7,69	%	54,93	%
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (DINSOS)	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100	%	91,37	%	91,37	%
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlayani, anak terlantar, lanjut usia terlayani dan golongan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibina pasti	2,8	%	0,16	%	5,71	%
31	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang telah memiliki Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	5	%	3	%	60,00	%
		PROGRAM PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang aktif	1	%	1	%	100,00	%
		PROGRAM PENGATAAN DESA	Persentase desa yang tertata dengan baik	1	%	1	%	100,00	%
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa yang dilaksanakan	1	%	1	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (DPMD)	100	%	80	%	80,00	%

No	OPD	Program	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100	%	92,13	%	92,13	%
		PROGRAM PENGOBAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pengobatan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100	%	41,15	%	41,15	%
		PROGRAM PENINGKATAN KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	100	%	98,38	%	98,38	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintahan (Satpol pp)	100	%	69,23	%	69,23	%
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	75	%	75,00	%
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCAJILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kegiatan yang Ditinjau Lajuti Dalam Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	%	88	%	88,00	%
		PROGRAM PENINGKATAN KETAHAPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Ketetapan Pemantauan Dalam Upaya Kamtibmas, Konflik Sosial dan Ketetapan Diri	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SEKTA BUDAYA POLITIK	Persentase program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintahan (Kasubag)	100	%	100	%	100,00	%
34	RSUD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya pelayanan kesehatan dari kesatuan	100	%	57,23	%	57,23	%
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah pasien operasi yang dilakukan	100	%	87,11	%	87,11	%
35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Yang Dihasilkan Tepat Waktu	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Penanaman Modal yang Diformasi	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENGEMBANGAN BELIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMA, PMDN, dan Investasi Daerah	7,55	%	7,55	%	100,00	%
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penanaman Modal yang Diformasi	4,8	%	4,8	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintahan	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMA, PMDN, dan Investasi Daerah	329554000000	rupiah	437124310040	rupiah	132,64	%
36	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang Terdiri Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintahan (BPKAD)	100	%	100	%	100,00	%
37	DINAS KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rawan pangan yang terbagi menjadi tahun pangan	4	desa	4	desa	100,00	%
		PROGRAM PENGELOLAAN KEAMANAN PANGAN	Persentase sekolah dasar yang terjamin keamanan pangannya	2	SD	0	SD	0,00	%
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	100	%	89,41	%	89,41	%

No	OPD	Program	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	% gasketan yang mendapatkan pelayanan distribusi pangan	100	%	91,73	%	91,73	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya pemangung urusan pemerintahan	100	%	79,62	%	79,62	%
38	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat akurasi dalam penetapan target PAD	100	%	134	%	134,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya pemangung urusan pemerintahan (Disputasi)	100	%	100	%	100,00	%
39	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA BIDANG PENTAM	Persentase Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	6,5	%	6,5	%	100,00	%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi	0	%	0	%	0,00	%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Disubdayakan	30	UM	30	UM	100,00	%
		PROGRAM PENINGKATAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi (orang)	150	orang	150	orang	100,00	%
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Jumlah Koperasi yang Berkualitas	0	%	0	%	0,00	%
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Dikembangkan	30	UM	30	UM	100,00	%
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	0	%	0	%	0,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya pemangung urusan pemerintahan	100	%	97,47	%	97,47	%
40	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	25,46	%	25,46	%	100,00	%
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	3,08	%	3,08	%	100,00	%
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	4,99	%	4,99	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya pemangung urusan pemerintahan (Dinas Perikanan)	90	%	90	%	100,00	%
41	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya pemangung urusan pemerintahan (Disperinduk)	100	%	98	%	98,00	%
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mandiri	20	%	15	%	75,00	%
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (TPP/PSCH/LKS bagian, indikator skala Upah dan terdapat peserta BPJS kemitraan/kerja)	30,83	%	30,5	%	98,93	%
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencakar yang ditempatkan/bekerja	4,1	%	2,5	%	60,98	%
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	4,1	%	3,3	%	80,49	%
42	DINAS PERDAGANGAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nilai SKM terhadap layanan pasar	82	%	80,71	%	98,43	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya pemangung urusan pemerintahan (Dinas Perdagangan)	100	%	98,82	%	98,82	%
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pelayanan tata / tata ulang alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelayanan tata / tata ulang alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen	100	%	89,2	%	89,20	%
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pengembangan ekspor yang dilaksanakan	0	%	0	%	0	%
43	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNYAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN HAMA DAN PENYAKIT	Persentase keberhasilan pengendalian dan penanganan hama yang terdapat tepat waktu	0	%	0	%	0,00	%

No	OPD	Program	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya penunjang urusan pemerintahan (Disperkapusda)	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase kebutuhan prasarana pertanian yang terpenuhi	20	%	20	%	100,00	%
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kebutuhan sarana pertanian yang terpenuhi (Disperkapusda)	15	%	15	%	100,00	%
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kebutuhan penyuluhan pertanian yang terpenuhi	40	%	40	%	100,00	%
44	DINAS PETERNAKAN	PROGRAM PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Kesehatan Hewan	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Peternakan)	100	%	98,97	%	98,97	%
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan prasarana pertanian yang terpenuhi (Dinas Peternakan)	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kebutuhan Sarana Pertanian yang terpenuhi (Dinas Peternakan)	100	%	100	%	100,00	%
45	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase jenis media promosi yang digunakan	50	%	38	%	76,00	%
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase objek budaya yang dilestarikan / dikelola dengan baik	1,59	%	1,5	%	94,34	%
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase seni budaya yang dilestarikan	5	%	3	%	60,00	%
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase objek wisata yang berkembang/aktif	39,28	%	12	%	30,55	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya penunjang urusan pemerintahan	100	%	89	%	89,00	%
46	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman yang tertata dengan baik	26	%	21	%	80,77	%
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Perataan dan Pengelolaan Tata Bangunan dan Lingkungannya	5	%	4	%	80,00	%
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung terbagian yg layak serta bangunan yg ber- DMB & berSIF	5	%	5	%	100,00	%
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak	41	%	30	%	95,12	%
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap drainase permukiman	46	%	40	%	86,96	%
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Desa yang terlayani Sistem Penyediaan Air minum (SPAM)	46	%	33	%	71,74	%
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU	4	%	3	%	75,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya penunjang urusan pemerintahan (DPRK)	100	%	86	%	86,00	%
47	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Perhubungan)	80	%	79,87	%	99,84	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGARAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpusat dan berfungsi dengan baik	80	%	71,71	%	89,64	%

No	OPD	Program	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
48	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase peningkatan ketertarikan kegiatan usaha (td) pengelolaan lingkungan hidup	60	%	60	%	100,00	%
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terpenuhinya penanganan pengaduan masyarakat	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENGELOLAAN KEMERAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTIH) dan TPU yang dikelola	15	%	14	%	93,33	%
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Peningkatan Kebersihan dan Ketersediaan di Kabupaten Pangkajene	24	%	24	%	100,00	%
		PROGRAM PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (BB) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH BB)	Persentase Peningkatan pelaku usaha penghasil Limbah B3 yg telah melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan	74	%	N/A	%		%
		PROGRAM PENGELOLAAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan kemitraan kelompok masyarakat yang peduli lingkungan hidup	62	%	56	%	90,32	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup	14	%	14	%	100,00	%
49	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan dan pengembangan secara rasional sumber daya air	80	%	80	%	100,00	%
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jasa konstruksi yang dilaksanakan	100	%	100	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (DPU/PR)	77	%	75	%	97,40	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten/desa dalam kondisi mantap (baik dan seimbang)	71	%	89	%	125,35	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase peraturan ruang yang dilaksanakan	90,98	%	89	%	97,82	%
50	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah	50	%	50	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Komunikasi dan Informatika)	100	%	98,41	%	98,41	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase jumlah data statistik sektoral yg dihasilkan	40	%	40	%	100,00	%
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah berita dipublikasikan	80	%	80	%	100,00	%
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah	50	%	94,65	%	189,30	%
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESHAJAHAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitas dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan	90	%	90,95	%	111,06	%
51	SEKRETARIAT DAERAH		Persentase Produk Hukum Daerah yang disosialisasikan, dipublikasikan dan bentuk hukum yang dilaksanakan	90	%	85,56	%	95,07	%
			Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	90	%	90	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi (Bagian Protokol)	77	%	92	%	119,48	%
			Persentase terfasilitasinya kegiatan bidang peraturan organisasi (Bagian Organisasi)	100	%	100	%	100,00	%
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Bagian Perencanaan dan Keuangan)	79,5	%	97,62	%	122,79	%
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMERINTAHAN	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	79	%	83,33	%	110,04	%

No	OPD	Program	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
			Indek Kepuasan Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Pelanggaran PMI	77	%	95,5	%	124,03	%
			Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Ummanur	90	%	N/A	%		%
52	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	% bencana yang tertangani	80	%	80	%	100,00	%
		PROGRAM PENUNGGAN URUBAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpusatnya pemangaj uruban pemerintahan (BPED)	84	%	84	%	100,00	%
Rata-rata capaian indikator program								79,37	%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD TAHUN 2021

*Kondisi per Tanggal 14 April 2022

NO	IKU dan IKD	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	3	4
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
I.1	Pertumbuhan Ekonomi	1,42%	-2,07%	-145,77%
I.2	Tingkat Kemiskinan	19,57%	21,57%	89,78%
I.3	Indeks Pembangunan Manusia	64,64	64,36	99,57%
I.4	Gini Rasio	0.31	NA	
II. ASPEK DAYA SAING				
I.3	Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	0,54%	17,18%	3181,48%
II.1	Indeks Kesalehan Sosial	69,40	69,69	100,42%
II.2	Angka Kriminalitas	3,53	3,6*	99,17%
II.3	Indeks Reformasi Birokrasi	55,5	55,38*	99,78%
II.4	Rata-Rata Layanan Infrastruktur	56,44%	58,53%	98,79%
III. ASPEK PELAYANAN UMUM				
III. 1. Urusan Wajib Yang berkait dengan Pelayanan Dasar				
III.1.1. Pendidikan				
III.1.1.1	Indeks Pendidikan	8,86	8,85	99,89%
III.1.2. Kesehatan				
III.1.2.1	Angka Harapan Hidup	71,23 tahun	70,22 tahun	98,58%
III.1.3. Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang				
III.1.3.1	Persentase infrastruktur dasar ke-PU-an dalam kondisi baik/terlayani	53,27%	62,80%	117,89%
III.1.4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman				
III.1.4.1	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	37,05%	36,04%	97,27%
III.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
III.1.5.1	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat atas perda yang terselesaikan	75%	98%	131%
III.1.6. Sosial				
III.1.6.1	Jumlah PMKS/PPKS	501.579 org	638.972 org	72,6%
III.1.6.2	Persentase Penanganan Bencana	80%	82%	103%
III. 2. Urusan wajib yang tidak berkait dengan Pelayanan Dasar				
III.2.1 Tenaga Kerja				
III.2.1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,07%	8,07%	100%
III.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				

NO	IKU dan IKD	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
III.2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender	57,71	60,03	104,02%
III.2.3 Pangan				
III.2.3.1	Skor pola pangan harapan konsumsi	78,8	73,4	93,15%
III.2.4 Lingkungan Hidup				
III.2.4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,25	55,36	95,04%
III.2.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
III.2.5.1	Jumlah desa tertinggal yang dientaskan	273 Ds	273 Ds	100%
III.2.5.1	Jumlah Desa Maju	21 Ds	27 Ds	129%
III.2.6 Perhubungan				
III.2.6.1	Persentase Infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80%	76,76%	95,95%
III.2.8 Komunikasi Dan Informatika				
III.2.8.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,9 Baik	1,62	55,86%
III.2.9 Koperasi Dan Usaha Mikro				
III.2.9.1	Jumlah omset usaha mikro dan koperasi	Rp. 5.808.489.180.480,-	Rp. 4.371.358.636.948	75,26%
III.2.10 Penanaman Modal				
III.2.10.1	Nilai Investasi daerah PMA, PMDN	Rp.330.000.000.000	Rp. 384.628.310.040	116,55%
III.2.11 Kepemudaan dan Olah Raga				
III.2.11.1	Jumlah pemuda berprestasi (regional dan nasional)	15 org	8 org	53,33%
III.2.12 Perpustakaan				
III.2.12.1	Indeks gemar membaca	32	31,53	98,5%
III. 3. Pelayanan Urusan Pilihan				
III.3.1 Pariwisata				
III.3.1	Jumlah kunjungan wisatawan	1.253.358 orang	248.265 orang	19,81%
III.3.2 Pertanian (arti luas)				
III.3.2.1	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	3,10%	-2,05%	-66,13%
III.3.3 Perdagangan				
III.3.3.1	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	1,08%	8,01%	741,67%
III.3.4 Perindustrian				
III.3.4.1	Pertumbuhan PDRB sektor industri	1,40%	2,66%	190,00%
III. 4 Urusan Fungsi Penunjang Urusan				
III. 4.1 Keuangan				
III. 4.1.1	Pertumbuhan PAD	29,65%	35,52%	119,80%

NO	IKU dan IKD	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
III. 4.1.2	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP*	100%
III. 4.2 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				
III. 4.2.1	Indeks Profesionalitas Aparatur	55	52,85	96,09%
III. 4.3 Penelitian dan Pengembangan				
III. 4.3.1	Persentase kebijakan berdasarkan Policy brief	27%	0%	0%
III. 4.4 Pengawasan				
III. 4.4.1	Level maturitas SPIP	Level 3	Level 2*	66,67%
III. 4.4.2	Nilai SAKIP	B(65,25)	B	94,96%
III. 4.5 Sekretariat Daerah				
III. 4.5.1	Status Kinerja LPPD	5T	5T*	100%
III. 4.5.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan	84,12	83,92	99,76%
III. 4.6 Kesatuan Bangsa Dan Politik				
III. 4.6.1	Persentase potensi maupun kasus SARA/politik/bela Negara yang terselesaikan	100%	95%	95%
IV. ASPEK DAYA SAING				
IV.1	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang dengan rencana tata ruang	87%	86%	99%

er Tanggal 14 April 2022

- TERDAPAT 9 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- TERDAPAT 33 INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)
- TERDAPAT 42 INDIKATOR RPJMD

Jumlah keseluruhan indikator kinerja RPJMD = 42 indikator

Jumlah indikator kinerja yang capaiannya minimal 80% = 32 indikator

% indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80% :

$$32/42 \times 100\% = 76,19\%$$

HASIL PERHITUNGAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021

NO.	NILAI UNSUR PELAYANAN									Rata-rata
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3,44
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
3	3	3	3	4	3	3	3	4	2	3,11
4	3	3	3	4	3	3	3	2	2	2,89
5	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3,00
6	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3,00
7	3	2	2	4	3	3	3	3	2	2,78
8	3	3	2	4	3	3	2	3	2	2,78
9	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3,00
10	3	3	2	4	2	3	3	3	2	2,78
11	3	3	2	4	3	3	2	3	2	2,78
12	3	3	2	4	3	3	3	3	2	2,89
13	3	2	2	4	3	2	2	3	2	2,56
14	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3,78
15	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3,00
16	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3,78
17	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,22
18	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3,44
19	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,22
20	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,22
21	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3,33
22	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3,11
23	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,22
24	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,22
25	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,22
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
28	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,22
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
33	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,22
34	2	3	2	4	3	2	3	3	2	2,67
35	2	2	2	4	2	2	3	2	2	2,33
36	2	3	2	4	2	3	3	3	2	2,67
37	3	2	2	4	3	2	2	3	2	2,56
38	3	2	3	4	3	3	3	3	2	2,89
39	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3,11
40	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3,11
41	3	3	2	4	3	3	3	2	2	2,78
42	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3,44
43	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,44
44	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3,00
45	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3,33
46	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,22
47	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,22
48	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,22
49	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,22
50	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3,00
51	3	3	3	4	3	3	3	4	2	3,11
52	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3,33
53	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,22
54	3	3	3	4	3	2	4	4	3	3,22
55	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3,33
56	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3,56
57	3	3	3	4	3	3	3	4	2	3,11
58	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,22
59	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3,33
60	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,22
61	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3,22
62	3	4	3	4	3	3	4	4	2	3,33

NO.	NILAI UNSUR PELAYANAN									Rata-rata
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
63	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3,22
64	4	4	2	4	4	2	4	4	3	3,44
65	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3,33
66	4	3	3	4	2	3	3	3	3	3,11
67	2	4	3	4	4	3	4	4	3	3,44
68	3	4	3	4	4	3	4	3	2	3,33
69	3	3	3	4	3	2	3	4	3	3,11
70	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3,22
71	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3,56
72	4	2	3	4	3	3	4	3	3	3,22
73	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3,33
ΣNilai/ Unsur	230	230	214	291	230	222	237	257	204	2115
NRR/ Unsur	3,11	3,11	2,89	3,93	3,11	3,00	3,20	3,47	2,76	28,58
NRR Tertimbang/ Unsur*	0,34	0,34	0,32	0,43	0,34	0,33	0,35	0,38	0,30	3,14
IKM Unit Pelayanan **										78,60
IKM Unit Pelayanan										BAIK

Bangkalan, Januari 2022
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BANGKALAN

EKO SETIAWAN, S.Si., MT
NIP. 19751121 200312 1 003

U1 - U9 : Unsur-unsur pelayanan
NRR : Nilai rata-rata
IKM : Indeks kepuasan masyarakat
-*) : Jumlah NRR IKM tertimbang
-**) : Jumlah NRR IKM tertimbang x 25
NRR Per : Jumlah nilai per unsur dibagi
Unsur : Jumlah kuesioner yang terisi
NRR : NRR per unsur x 0,11 per unsur
Tertimbang

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,11
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,11
U3	Waktu Penyelesaian	2,89
U4	Biaya/Tarif	3,93
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,11
U6	Kompetensi Pelaksana	3,00
U7	Perilaku Pelaksana	3,20
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,47
U9	Sarana dan Prasarana	2,76

Permenpan RB No 14 tahun 2017
IKM UNIT PELAYANAN

Mutu Pelayanan :

Nilai Interval SKM	Nilai Interval konversi Indeks	Nilai	Persepsi
3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik
3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik

Perhitungan Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI			%Capaian	
	Kinerja		(Rp)	Kinerja		(Rp)	Kinerja	(Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	96	%	6.449.857.842	95,37	%	6.171.530.118	99,34	95,68%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	30.885.450	100	%	28.944.350	100	93,7%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	17.379.300	3	Dok	17.379.300	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	1.137.700	1	Dok	1.137.700	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	1.137.700	1	Dok	1.137.700	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Dok	1.137.700	1	Dok	371.700	100%	32,67%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	1.512.700	1	Dok	1.421.700	100%	93,98%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dok	5.601.700	1	Dok	5.601.700	100%	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Lap	2.978.650	8	Lap	1.894.550	100%	63,60%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	4.409.243.125	104,8	%	4.393.764.854	104,8%	99,6%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang	4.376.478.175	55	Orang	4.363.480.954	100%	99,70%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250	Lap	1.696.000	310	Lap	660.750	124%	38,96%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Lap	1.272.200	12	Lap	597.200	100%	46,94%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dok	27.390.100	1	Dok	27.390.100	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Lap	2.406.650	18	Lap	1.635.850	100%	67,97%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	3.095.800	100	%	2.593.800	100%	83,8%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7	Lap	1.398.600	7	Lap	1.137.600	100%	81,34%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Lap	1.697.200	7	Lap	1.456.200	100%	85,80%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	94.469.450	100	%	94.357.250	100%	99,9%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	9.166.400	1	Unit	9.054.200	100%	98,8%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90	buah	85.303.050	90	buah	85.303.050	100%	100%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	-	0	Orang	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	-	0	Orang	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	351.058.700	77,76	%	218.045.603	77,76%	62,11%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	140	Unit	14.302.350	128	Unit	11.628.500	91,43%	81,30%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1225	Unit	114.319.300	1107	Unit	78.411.150	90,37%	68,59%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Unit	18.399.100	1	Unit	12.189.100	100%	66,25%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7	Jenis	31.946.950	7	Jenis	15.074.400	100%	47,19%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5	Jenis	8.100.000	5	Jenis	6.660.000	100%	82,22%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Kali	7.753.000	5	Kali	3.570.000	20,83%	46,05%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Kali	156.238.000	50	Kali	90.512.453	41,67%	57,93%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	Jenis	-	0	Jenis	-	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100	%	208.348.900	86,49	%	203.094.250	86,49%	97%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37	Unit	208.348.900	32	Unit	203.094.250	86,49%	97,48%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.124.308.305	100	%	1.023.110.462	100%	91%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Jenis	13.741.005	4	Jenis	9.610.100	100%	69,94%

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI			%Capaian	
	Kinerja		(Rp)	Kinerja		(Rp)	Kinerja	(Rp)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Jenis	141.550.600	3	Jenis	84.506.862	100%	59,70%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jenis	133.169.600	1	Jenis	132.774.400	100%	99,70%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7	Jenis	835.847.100	7	Jenis	796.219.100	100%	95,26%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	228.448.112	93,90	%	207.619.549	93,90%	91%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20	Unit	85.544.913	20	Unit	70.656.332	100%	82,60%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	Unit	33.013.905	8	Unit	31.582.097	100%	95,66%
Pemeliharaan Mebel	0	Jenis	-	0	Jenis	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	78.143.644	1	Unit	77.255.470	100%	98,86%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	123	Unit	31.745.650	93	Unit	28.125.650	76%	88,60%

	Jumlah Total	Sesuai	
Program	244	242	99,18%
Indikator Program	244	232	95,08%
Kegiatan	741	733	98,92%
Indikator Kegiatan	741	433	58,43%
Target	985	605	61,42%
Pagu	985	587	59,59%

Rata-Rata Keselarasan Dokumen Perencanaan	78,77%
Keselarasn Dokumen Perencanaan dengan Pelaksanaan	94,57%
Jumlah	173,34%

Rata-Rata Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Pelaksanaan

= 173,34% : 2
 = 86,67 %

**TARGET KINERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2019-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi			KET.
		2021	2022	2023	
I.	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH DENGAN KUALITAS BAIK	65,38 (34 dari 52 PD)	98,08 (51 dari 52 PD)	100 (52 dari 52 PD)	PROGRAM
A.	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	90,91 (10 dari 11 PD)			--
1	Dinas Pertanian Tapahorban	25,00			
2	Dinas Peternakan	17,50			
3	Dinas Perikanan	23,00			
4	Dinas Ketahanan Pangan	19,50			
5	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	22,00			
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	21,20			
7	Dinas Perdagangan	22,00			
8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	21,95			
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	22,00			
10	Badan Pendapatan Daerah	22,75			
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	24,00			
	Nilai Rata-rata Perencanaan Kinerja Bidkosda	21,90	0,00	0,00	
B.	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	100 (7 dari 7)			--
1	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	25,10			
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	22,15			
3	Dinas Lingkungan Hidup	23,20			
4	Dinas Perhubungan	25,70			
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	23,90			
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23,23			
7	Sekretariat Daerah	23,00			
	Nilai Rata-rata Perencanaan Kinerja Bid. Infrasil	23,75	0,00	0,00	
C.	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	50,00 (17 dari 34 PD)			--
1	Dinas Pendidikan	27,25			
2	Dinas Kesehatan	21,86			
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21,98			
4	Dinas KB dan PSA	24,65			
5	Dinas Sosial	25,10			
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	21,65			
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19,38			
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	14,28			
9	RSUD Syamsaba	25,31			
10	Sekretariat DPRD	10,34			
11	Inspektorat	27,00			
12	BKPSDA	21,85			
13	Bappeda	27,00			
14	Baitbangda	22,35			
15	Bakesbangpol	21,34			
16	Satuan Polisi Pamong Praja	18,75			
17	Kecamatan Arosbaya	15,50			
18	Kecamatan Bangkalan	15,32			
19	Kecamatan Burneh	10,14			
20	Kecamatan Tanah Merah	10,14			
21	Kecamatan Galis	15,36			
22	Kecamatan Blega	19,56			
23	Kecamatan Lumbang	8,21			
24	Kecamatan Tragah	8,43			
25	Kecamatan Modung	8,35			
26	Kecamatan Kokop	15,72			
27	Kecamatan Konang	10,15			
28	Kecamatan Geger	8,17			
29	Kecamatan Klampis	21,56			
30	Kecamatan Tanjung Bumi	10,14			
31	Kecamatan Kwanyar	10,07			
32	Kecamatan Socah	10,17			
33	Kecamatan Kamal	15,72			
34	Kecamatan Sepulu	10,08			
	Nilai Rata-rata Perencanaan Kinerja Bid. PPM	17,14	0,00	0,00	
	I Rata-rata Nilai Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	20,93	0,00	0,00	--
	% PD dgn Nilai Perencanaan Kinerja Berkualitas Baik (Target Indikator Sasaran Bappeda)	73,08	98,08	100	
	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dgn Mendukung SAKIP (Target Indikator Tapan Bappeda)	23,63	24,51	25,34	--

Legenda Warna:

■ = Angka Prestasi, karena nilai ada data
■ = Angka Prestasi, tanpa data akurat (diperkirakan tahun dasar 2018)

PERINGKAT	NILAI SAKIP	NILAI PERENCANAAN	
A+	> 90 - 100	> 27 - 30	30
A	> 80 - 90	> 19 - 27	27
B+	> 70 - 80	> 11 - 19	24
B	> 60 - 70	> 8 - 11	21
C+	> 50 - 60	> 5 - 8	18
C	> 40 - 50	> 3 - 5	15
D	> 30 - 40	> 0 - 3	9

NILAI SAKIP BANGKALAN

Keterisian Elemen Data Profil Pembangunan Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Jumlah Elemen Data	Elemen Data yang Terisi	% Keterisian Elemen Data
1	Dinas Pendidikan	80	56	70
2	Dinas Perhubungan	33	21	63,64
3	Dinas Lingkungan Hidup	40	26	65
4	Dinas PUPR	57	21	36,84
5	Dinas PRKP	27	10	37,04
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36	36	100
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17	17	100
8	BKPSDA	7	6	86
9	Dinas PMD	11	8	73
10	Sekretariat DPRD	5	5	100
11	Bapenda	4	3	75
12	Dinas Peternakan	14	14	100
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	14	7	50
14	Dinas Perdagangan	13	3	23
15	Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja	87	28	32
16	Bagian Adpurn	6	4	67
17	Dinas Kebudayaan & Pariwisata (Kebudayaan)	22	17	77
	Dinas Kebudayaan & Pariwisata (Pariwisata)	58	21	36
18	Dinas Koperasi	20	12	60
19	DPMPTSP	12	4	33
20	Dinas Perpustakaan & Kearsipan (Pepustakaan)	17	5	29
	Dinas Perpustakaan & Kearsipan (Kearsipan)	11	4	36
21	Dispertapahorbun	5	5	100
22	Polres	3	3	100
	UPT BPD Bangkalan	1	1	100
Total		600	337	56,17